

RENCANA KERJA (*Renja*)

Perubahan

Tahun 2025

MUBA MAJU
Lebih CEPAT



KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



: babatsupatupdate.com



Gmail : babatsupatyes@gmail.com



YouTube : Babat Supat Update



: Babatsupat Terkini



: babatsupatterkini



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KECAMATAN BABAT SUPAT

Jalan Palembang - Jambi Desa Babat Banyuasin Kode Pos : (30755)
Email : babatsupatyes@gmail.com / website : www.babatsupatupdate.com

KEPUTUSAN CAMAT BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 67 /KPTS/BS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CAMAT BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 15 (Ayat I), bahwa :
1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
 2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 di Kecamatan Babat Supat

Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Camat Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036;
11. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045 Kabupaten Musi Banyuasin;

13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Surat Edaran Nomor : B-000.7.3/032/BAPPEDA/2025, tanggal 14 Februari 2025 tentang Rencana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026;
15. Surat Edaran Bupati nomor : B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Rencana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat (Renja-PD) Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Perioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun semua data baik yang bersifat Administrasi Umum maupun Operasional yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- b. Melakukan koordinasi, konsultasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja

(Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin.

- c. Melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Melakukan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
- e. Melakukan Perbaikan/Revisi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan perkembangan kinerja, tugas dan fungsi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
- f. Melaporkan perkembangan Penyusunan/Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 kepada Camat Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Babat Banyuasin
Pada tanggal : 10 Februari 2025

**CAMAT BABAT SUPAT,
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



DEBBY HERYANTO. S.STP,M.Si
Pembina TK.I / IV.b
NIP 19830709 200212 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
 Nomor : 67/KPTS/BS/2025
 Tanggal : 10 Feb 2025
 Tentang : Pembentukan Tim Satgas Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	Camat Babat Supat	
2.	KETUA	Sekretaris Kecamatan Babat Supat	
3.	SEKRETARIS	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
4.	KOORDINATOR	1. Kasi Pelayanan Umum 2. Kasi Pemerintahan. 3. Kasi Trantib. 4. Kasi PPD/K. 5. Kasi Kesos. 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
5.	ANGGOTA	Seluruh Staf Kecamatan Babat Supat	

**CAMAT BABAT SUPAT,
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



DEBBY HERYANTO. S.STP,M.Si

Pembina Tk.1/IV.b

NIP 19830709 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN BABAT SUPAT

Jalan Palembang - Jambi Desa Babat Banyuasin Kode Pos : (30755)
Email : babatsupatyes@gmail.com / website : www.babatsupatupdate.com

KEPUTUSAN CAMAT BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 66 / KPTS / KEC.BS / 2025

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 15 (Ayat I), bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Surat Edaran Bupati nomor : B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Rencana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat (Renja-PD) Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

13. Keputusan Camat Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Nomor/KPTS/BS/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BABAT SUPAT PERUBAHAN TAHUN 2025

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang memuat program, kegiatan, Sub Kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Camat Babat Supat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Induk dan Perubahan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

KEEMPAT : Camat Babat Supat mengevaluasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah

dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Babat Banyuasin
Pada tanggal : 16 Juni 2025



CAMAT BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DEBBY HERYANTO. S.STP.,M.Si

Pembina TK.I / IV.b

NIP 19830709 200212 1 001

KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) 2023-2026, Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk mengemban tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023 – 2026 yang dituangkan dalam rencana kerja selama satu tahun. Untuk tercapainya tujuan tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan pada Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana kerja, penegakan disiplin dan budaya kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek/diklat, pemantapan administrasi keuangan daerah, mewujudkan administrasi keuangan daerah sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah untuk meningkatkan kinerja Kantor Camat Babat Supat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Babat Supat pada Tahun 2025 ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dengan didukung oleh 5 program dan 13 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan untuk mencapai Tujuan ke 3 (Ketiga) Kabupaten Musi Banyuasin ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”*** untuk mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut Kantor Camat Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Tujuan yaitu ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah*** untuk mencapainya dalam Tahun 2025 ini. Keberhasilan

dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Babat Supat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya semoga Rencana Kinerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya **good governance** di Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Babat Banyuasin

Pada tanggal : 16 Juni 2025

CAMAT BABAT SUPAT,
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DEBBY HERYANTO. S.STP,M.Si

Pembina TK.I / IV.b

NIP 19830709 200212 1 001



Daftar Isi

	<u>halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	4
I.3. Maksud dan Tujuan	7
I.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	10
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD.....	10
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..	43
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	45
II.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat....	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD.....	57
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	57
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	65
III.3 Program dan Kegiatan.....	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	74
BAB V PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan PD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh PD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) PD untuk tahun rencana yang dimaksud. Rencana kerja PD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Rencana Kerja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja PD Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal PD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan PD, adalah sebagai berikut :

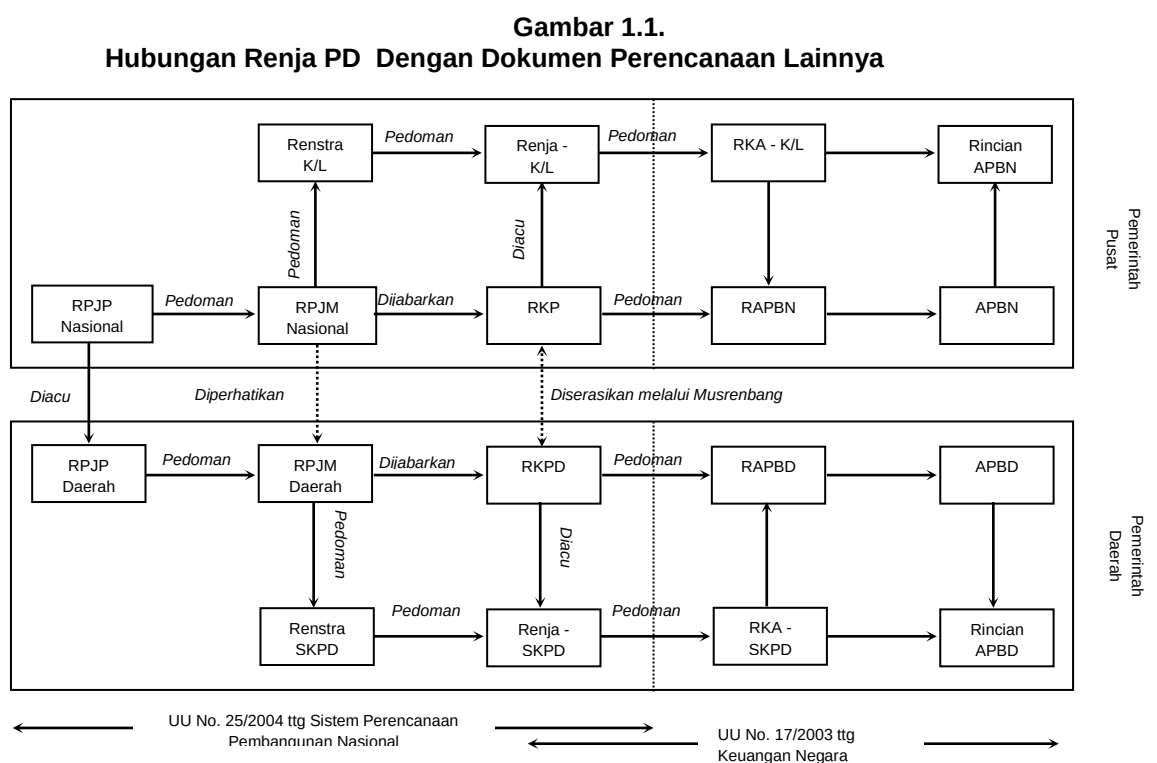
1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RPJMD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja perubahan PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan dan penunjang pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
3. Penyusunan Renja Perubahan PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD-P, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD-P;
4. Rumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan di dalam renja Perubahan PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan/ penunjang pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD-P dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perubahan PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD-P. Renja PD.

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati nomor : B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Rencana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat (Renja-PD) Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Penyesuaian Arah

Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dengan memastikan Visi-Misi dan Program unggulan Kepala Daerah Terpilih serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan.

Gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1



Dalam kaitan dengan **sistem keuangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD satu tahun ke depan. Dengan demikian Perangkat Daerah dapat menentukan besaran anggaran

yang diperlukan dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan secara bertahap akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-PD.

Struktur Organisasi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

I.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden No.29/2014 tentang SAKIP;
15. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
18. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045;
24. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
25. Peraturan Bupati Nomor tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029

26. Surat Edaran Bupati nomor : B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Rencana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat (Renja-PD) Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur kewilayahan Pemerintah Daerah. Guna mendukung Tujuan ke-1 (satu) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu ***“Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas”***

Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Kecamatan sehingga tugas dan fungsi Kecamatan Babat Supat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan Subkegiatan tahunan yang Transparan, Akurat, dan akuntabel;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur Kecamatan dalam perumusan substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, terinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten guna tercapainya efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babat

Supat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029, serta Visi-Misi dan Program unggulan Kepala Daerah Terpilih serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi, Evaluasi capaian kinerja dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang ;

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tugas dan fungsi;

I .4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

- Bab I PENDAHULUAN, yang berisi I.1. Latar Belakang, I.2. Landasan Hukum, I.3. Maksud dan Tujuan dan I.4. Sistematika Penulisan.
- Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisikan II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD, II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri III.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional, III.2. Tujuan dan

Sasaran Renja PD, III.3. Program dan Kegiatan.

Bab	IV	RENCANA	KERJA	DAN	PENDANAAN	PERANGKAT
		DAERAH				
Bab	V	PENUTUP				

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Realisasi Belanja Kecamatan Babat Supat Tahun 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp. 3.551.807.288,00 atau (23,08%) dari Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 820.078.832,00 yang terdiri dari :

1. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
2. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan Kepmendagri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

- 1) Data Realisasi anggaran Belanja Pegawai yang terpakai pada Kecamatan Babat Supat Kab. Muba Per tanggal 31 Maret 2025. Realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 393.709.957,00 atau (19,26%) dari Anggaran sebesar Rp. 2.043.428.753,00. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket
A.	Belanja Pegawai	2.043.428.753,00	393.709.957,00	19,26%
Total Belanja Pegawai		2.043.428.753,00	393.709.957,00	19,26%

- 2) Realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terpakai (1 Januari s/d 31 Maret 2025) pada Kecamatan Babat Supat Kab. Muba adalah sebesar Rp. 329.268.875,00 atau 23,83% dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 1.381.412.607,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket
B	Belanja Barang dan Jasa		1.381.412.607,00	329.268.875,00	
	1	Belanja Barang	597.941.835,00	188.595.000,00	
	2	Belanja Jasa	441.384.688,00	86.930.575,00	
	4	Belanja Pemeliharaan	234.542.000,00	6.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas		107.544.084,00	47.743.300,00	
	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.544.084,00	47.743.300,00	
Sub Total Belanja Barang dan Jasa			1.381.412.607,00	329.268.875,00	23,83%

3). Realisasi anggaran Belanja Modal yang terpakai (1 januari s/d 31 Maret 2025) pada Kecamatan Babat Supat Kab. Muba adalah sebesar Rp. 97.100.000,00 atau 76,47% dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 126.965.928,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket
C	Belanja Modal		126.965.928,00	97.100.000,00	76,00 %
	1	Belanja Modal Alat Besar	6.000.000,00	6.000.000,00	
	2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.442.378,00	72.000.000,00	
	3	Belanja Modal Komputer	45.523.550,00	19.100.000,00	

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Per program Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin yang tercantum pada Tabel dibawah ini sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	530.901.200,00	19.240.000,00	3,91
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.760.000,00	0,00	0,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.747.000,00	0,00	0,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.520.000,00	0,00	0,00
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Supat)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2.968.791.488,00	699.704.291,00	23,05
Jumlah Total Anggaran			3.548.719.688,00	718.944.291,00	20,24

Implementasi Rencana Strategis 2025-2029 pada tahun Anggaran 2025 mencakup pelaksanaan 26 Sub kegiatan 13 Kegiatan dan 5 program untuk mendukung 2 sasaran stratejik dan 1 (satu) Sasaran rutin pendukung kantor. Capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2025 dan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, telah ditetapkan 5 program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Kepmendagri Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pengganti Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perlu dilakukan. **Program** merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan **Kegiatan** merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin dan **Sub Kegiatan** merupakan penjabaran dari kegiatan sebagai arah untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kegiatan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kepmendagri Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pengganti

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin, maka program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Program utama yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1). Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

Kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

Kegiatan :

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, Dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
2. Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya

5). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan/material
7. Fasilitas Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dari hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Babat Supat dan Penjelasan diatas dapat dilihat pada table dibawah ini :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

OPD : KECAMATAN BABAT SUPAT

Tabel T-C.29

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
7					URUSAN	UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				BIDANG URUSAN	KECAMATAN										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
						2	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
						3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
						4	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen	24 Dokumen	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100	8 laporan	24 laporan	3,43	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bayar	28 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100	14 Orang	36 orang	1,29	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100	14 Orang	42 Orang	1,50	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	100	0 Paket	22 Paket	0,79	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIM	2 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	2 Orang	2 Orang	1,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Progra m (Renstr a PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	9 Paket	0,75	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	18 Paket	4,50	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	18 Paket	18 Paket	18 Paket	100	18 Paket	54 Paket	3,38	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	33 Paket	33 Paket	33 Paket	100	33 Paket	99 Paket	3,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	18 Paket	3,60	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	#DIV/0!	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	2,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	3,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	3,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah		Persentase Pengadaan Barang	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan									
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	39 Unit	39 Unit	39 Unit	100	39 Unit	117 Unit	29,25	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	3,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	3,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan digunakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	6 unit	0,55	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	2 unit	2 Unit	#DIV/0!	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	1 Unit	0,13	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Output	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Output	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Output	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	15 Dokumen	3,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Output	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	02	2.02	0003	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	#DIV/0!	24 Dokumen	24 Laporan	#DIV/0!	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100	8 Dokumen	24 Laporan	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Output	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Output	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peraturan Kepala Daerah	Output	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	4 Laporan	4 Dokumen	#DIV/0!	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Output	Persentase Penegakan Perda	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 Dokumen	3,00	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Output	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 Dokumen	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	16 Laporan	48 Laporan	3,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Output	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Output	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100	40 Orang	120 Orang	3,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Output	Persentase jumlah Desa yang dibina	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Output	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket
										Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
							Pemerintahan Desa									
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Output	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	16 Dokumen	18 Dokumen	1,13	
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Output	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	16 Laporan	16 Laporan	1,00	

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

Sesuai dengan Rencana Srategis (Renstra) Kecamatan Babat Supat 2023-2026, telah ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dan pencapaian kinerja pelayanan untuk Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2025 (thn n)	Catatan Analisis
			Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (TW I)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	95	95	95	94,5	94,5	94,5	95	
2	Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	%	100%	

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025, implementasi Rencana Strategis 2023-2026 mencakup pelaksanaan 25 Sub Kegiatan, 13 kegiatan dan 5 program untuk mendukung 1 sasaran strategis Capaian kinerja (*Perfeormance Results*). dan 1 sasaran rutin pendukung kantor selama Tahun 2025 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi s/d TW I
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat.	1.	Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	95	94,5
		2.	Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi	(%)	25%	25%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan (Kecamatan Babat Supat)	1.	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.	(%)	100%	100%
		2.	Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	(%)	100%	100%
		3.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	(%)	100%	100%
		4.	Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	(%)	100%	100%

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis, dengan 2 (dua) indikator yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2025.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat ada 2 indikator kinerja sasaran didukung oleh program :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Urusan Kewilayahan dan Pelayanan Publik yang menunjang Tugas dan Fungsi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

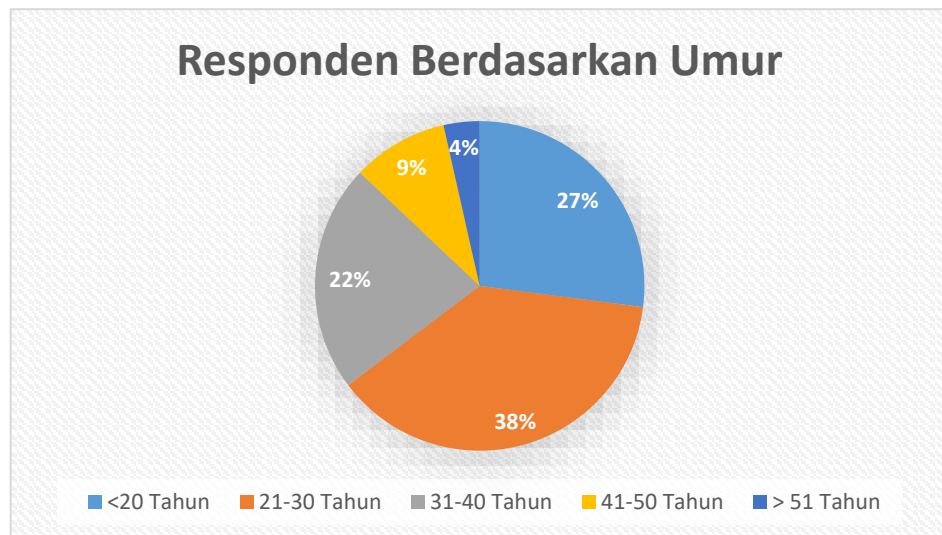
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat.	1. Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	95	94,5	99,47%
	2. Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi	Persentase	25%	25%	100%

1. Indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat

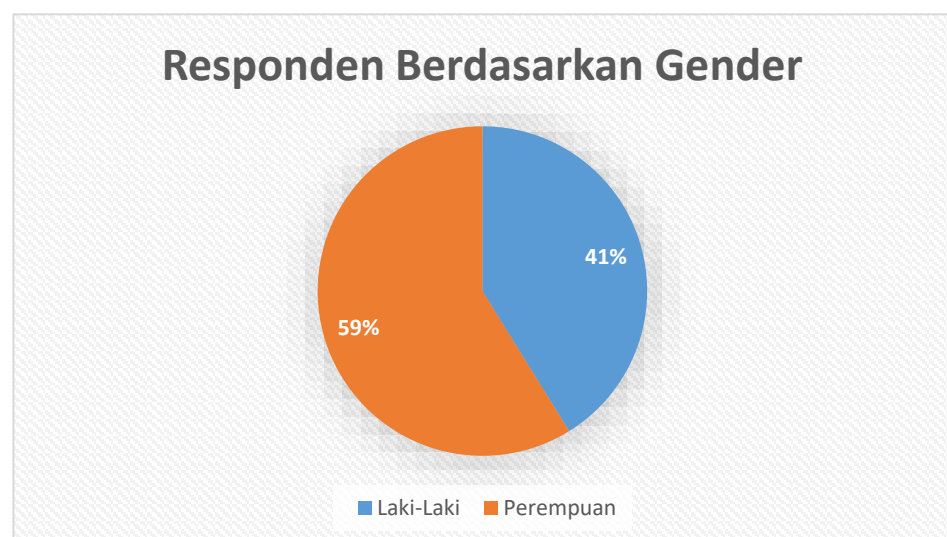
dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian			
	Triwulan I Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	95	94,5	99,47%

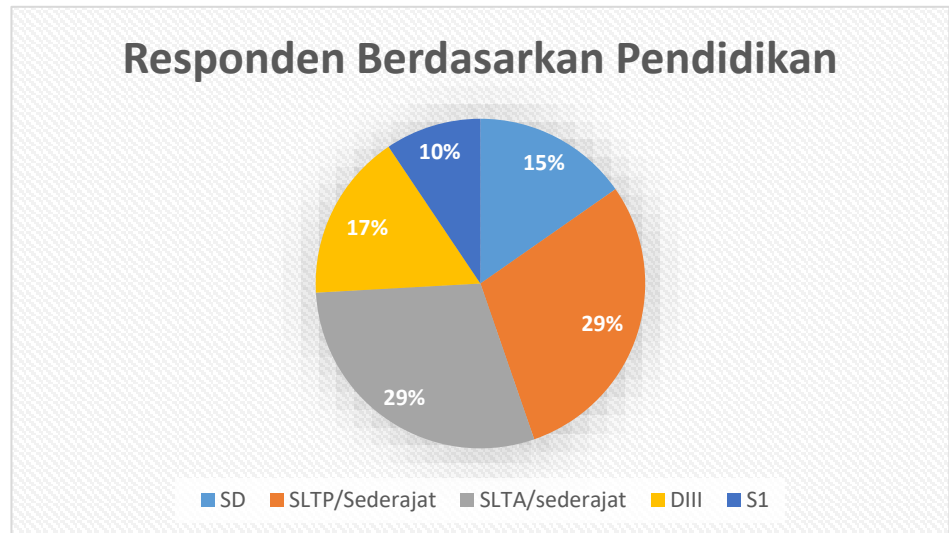
Berdasarkan tabel di atas Indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat pada Triwulan I Tahun 2025 dari target 95 dan realisasi 94 sehingga memperoleh capaian 98,95%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pada kantor Kecamatan Babat Supat dapat dikategorikan sangat baik, hasil ini dari data responden pengguna pelayanan Triwulan I tahun 2025 pada kecamatan sebanyak 85 responden, dengan rincian :



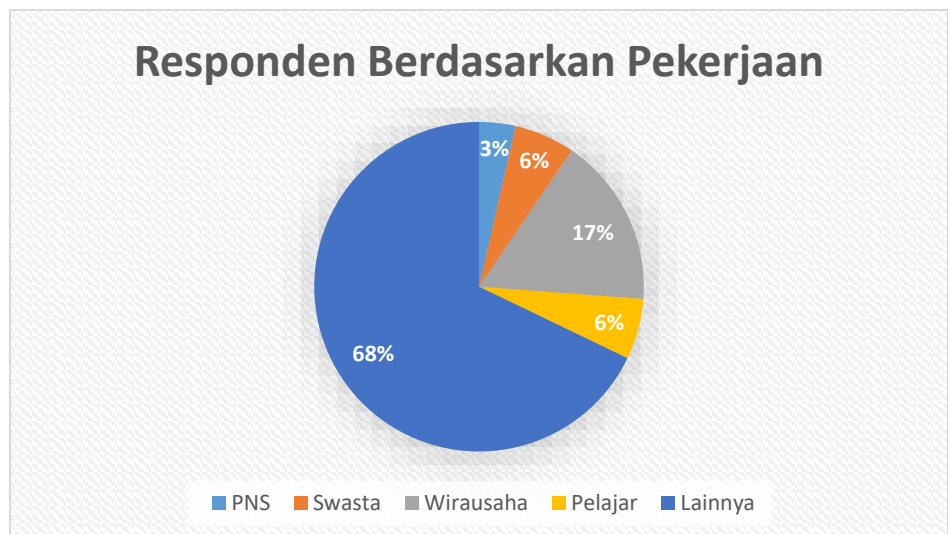
Dari diagram diatas responden yang melakukan survey kepuasan pelayanan pada kantor kecamatan Babat Supat berdasarkan umur adalah : <20 Tahun : 23 Orang, 21-30 Tahun : 32 Orang, 31-40 Tahun : 19 Orang, 41-50 Tahun : 8 Orang, >51 Tahun : 3 Orang.



Dari diagram diatas responden yang melakukan survey kepuasan pelayanan pada kantor kecamatan Babat Supat berdasarkan Gender yang didominasi oleh responden perempuan sebanyak 50 orang dan Laki-laki 35 Orang.

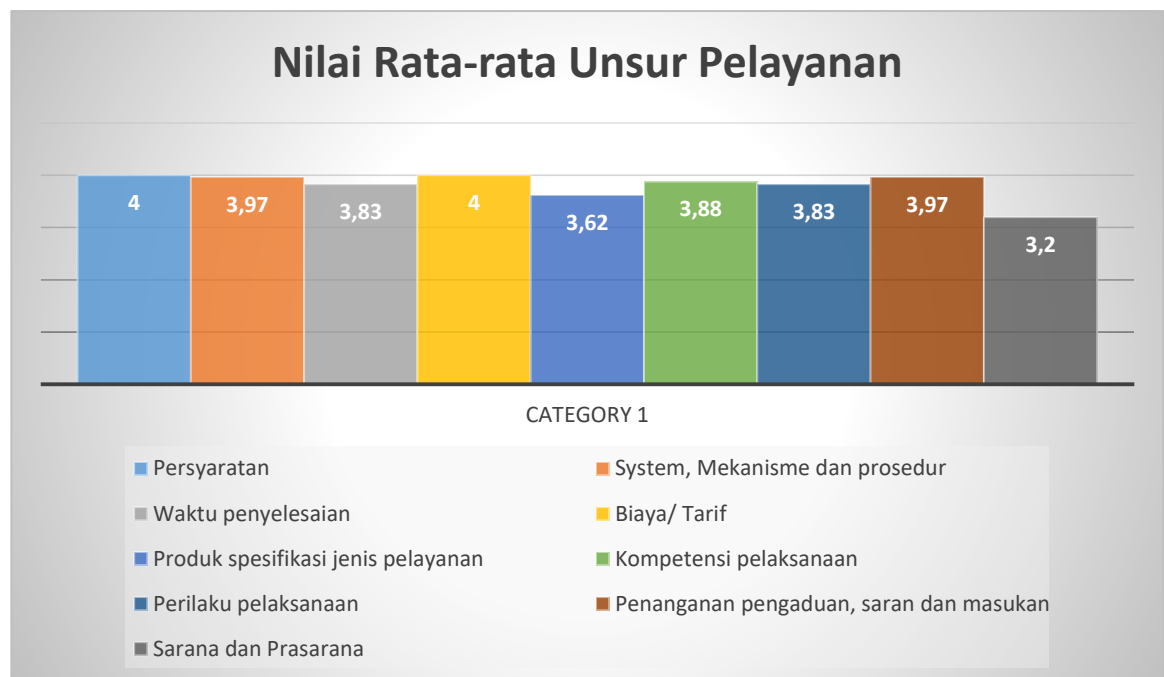


sedangkan dari tingkat pendidikan responden pengguna layanan terdiri dari SD 13 Orang, SLTP Sederajat 25 Orang, SLTA Sederajat 25 Orang, DIII 14 Orang, S1 8 Orang.



Dari diagram diatas responden yang melakukan survey kepuasan pelayanan pada kantor kecamatan Babat Supat berdasarkan Pekerjaan yang

terdiri dari : PNS : 3 Orang, Swasta : 5 Orang, Wirausaha : 14 Orang, Pelajar : Lainnya ; 57 Orang.



hasil skor nilai survey yang dapat dilihat pada diagram diatas dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$IKM = \text{Nilai rata-rata tertimbang unsur} \times 25$$

Dari data diatas jumlah Nilai rata-rata unsur sebesar : $34,3 \times 0,111 = 3,78$. Nilai rata-rata tertimbang unsur, Dari hasil tersebut maka akan didapat hasil IKM dengan rumus diatas.

$$94,5 = 3,78 \times 25$$

Dari hasil tersebut hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disajikan pada triwulan I tahun 2025 sudah **Sangat Baik** dan akan terus ditingkatkan, hasil tersebut merupakan kumpulan beberapa jenis pelayanan yang ada pada kantor Kecamatan Babat Supat antara lain ;

1. Urusan pemerintahan kecamatan sesuai dengan fungsinya;

2. Menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan fungsinya;
3. menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan sesuai dengan fungsinya;
4. Menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum sesuai dengan fungsinya.

Yang menjadi perhatian dan evaluasi serta tindak lanjut dimasa yang akan datang khususnya unsur sarana dan prasarana, semoga dengan hasil ini memacu semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kecamatan Babat Supat lebih baik lagi dan terus meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, Desa, piha-pihak terkait yang membutuhkan pelayanan di lingkup wilayah kecamatan Babat Supat,

Capaian indikator ***Indeks Kepuasan masyarakat*** didukung oleh :

- | | |
|-----------------|---|
| Program | : Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |
| Kegiatan | : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Sub Kegiatan | : 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Kegiatan | : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
| Sub Kegiatan | : 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| Kegiatan | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang |

Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Terkait dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

**Program : Program koordinasi ketentraman dan
ketertiban umum;**

**Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah**

Sub Kegiatan : 1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Program : Program penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum;**

**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional

Untuk capaian ***Indeks Kepuasan masyarakat*** sudah dilaksanakan
sampai dengan Triwulan I sesuai dengan capaian target yaitu 99,47%.

2. Indikator Kinerja Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi

dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian			
	Triwulan I Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi	Persentase	25%	25%	100

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi dari target 25% dengan realisasi 25%. Merupakan indikator kinerja target dengan realisasi sesuai dengan formula yang telah di dibuat dalam IKU.

Pada Triwulan I Tahun 2025, kegiatan pembinaan terhadap aparatur desa/kelurahan dalam rangka peningkatan tertib administrasi telah dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah sasaran. Dari total 16 (enam belas) desa, sebanyak 4 (empat) desa atau 25% telah mendapatkan pembinaan administratif sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku.

Pembinaan meliputi penguatan kapasitas dalam pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, serta administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Kegiatan dilaksanakan melalui bimbingan teknis, asistensi lapangan, serta monitoring dan evaluasi oleh tim pembina dari tingkat kecamatan

Pencapaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan tertib secara administrasi. Diharapkan, pada triwulan berikutnya, cakupan

pembinaan dapat terus ditingkatkan hingga mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

Capaian indikator Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut:

Program : Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2. Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir.

a) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja		Satuan	Proyeksi Capaian 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2023 (%)	% Rata-rata capaian	Ket
1	Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	100%	99,47%	99,47%	99,64%	

Indikator Kinerja		Satuan	Proyeksi Capaian 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2023 (%)	% Rata-rata capaian	Ket
2	Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	

3. Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan Tahun ini dan beberapa tahun.

Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Proyeksi capaian Realisasi kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

a) Sasaran Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Naik (Turun)	Ket
			2023	2024	Proyeksi 2025		
1	Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	94,5	94,5	95	Naik	
2	Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi	Persentase	100%	100%	100%	Tetap	

4. Perbandingan capaian Realisasi kinerja Proyeksi Tahun 2025 dengan target dalam Rencana Strategis Kecamatan Babat Supat Tahun 2023-2026.

Pada capaian ini dapat di lihat perbandingan capaian realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target kinerja empat tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi Realisasi 2025	Target 2025	Capaian %
1	Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	94,5	94,5	95	95	100 %
2	Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

▪ **Capaian Indikator Indeks Kepuasan masyarakat**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data realisasi Indeks Kepuasan masyarakat pada tahun pertama Renstra 2023-2026 dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2025 dengan tingkat pencapaian yaitu 99,64%. Pada akhir tahun 2025 semoga target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik dan secara umum semua Pelayanan kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Babat Supat, dan didukung oleh Program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2025 dapat terlaksana sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

▪ **Capaian Indikator Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Data Persentase Aparatur Desa /kelurahan Yang dibina Tertib administrasi pada tahun pertama Renstra 2023-2026 dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi pada tahun 2025 dengan tingkat pencapaian yaitu 100%. Pada akhir tahun 2025 semoga target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik dan secara umum semua Pembinaan Aparatur Desa yang tetib administrasi terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Babat Supat, dan didukung oleh Program, kegiatan,

subkegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2025 dapat terlaksana sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran Pendukung Kantor Kecamatan yaitu **Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan**, dengan 1 (satu) indikator yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian			
		Triwulan I Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Urusan Kewilayahan	Persentase	23,8%	19,8%	83,19%

Capaian indikator Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Urusan Kewilayahan sebesar 19,8% dari target 23,8%. Dengan capaian 83,19% Hal ini didukung oleh :

Program : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Bahan/material
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel

kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan

Urusan Kewilayahan

Indikator Kinerja		Satuan	Proyeksi Capaian 2025	Capaian 2024	Capaian 2023	% Rata-rata capaian	Ket
1	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Urusan Kewilayahan	(%)	100	100	100	100%	

Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan Tahun ini dan beberapa tahun

Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan

Urusan Kewilayahan

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Naik (Turun)	Ket
			2023	2024	Proyeksi 2025		
1.	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Urusan Kewilayahan	(%)	100%	100%	100%	Tetap	

Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun Tahun 2023 dengan target dalam Rencana Strategis Kecamatan Babat Supat Tahun 2023-2026

Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan

Urusan Kewilayahan

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi Realisasi s/d 2025	Target 2025	Capaian %
1.	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Urusan Kewilayahan	(%)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel diatas dapat kita lihat Capaian dari keempat Indikator pada Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan, pada awal tahun Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Kecamatan Babat Supat, pada tahun pertama Renstra Tahun 2023 keempat indicator tercapai 100% dari target 100%, dan diharapkan sampai dengan tahun Renstra 2026 tidak mengalami penurunan capaian target.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam Perencanaan Pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang, suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu Strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, karekteristik suatu isu strategis adalah kondisi

atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian, dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, untuk memperoleh rumusan isu-isu Strategis di perlukan analisis terhadap berbagai faktor dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis Rencana Strategis Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin periode 2025-2029, ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029, dimana Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) unsur kewilayahan yang berperan sangat penting dalam mencapai Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi di mana terlaksananya kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik dalam roda pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin , Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa isu-isu strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Musi Banyuasin, selama beberapa tahun sebelumnya dan berbagai permasalahan dan potensi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin di masa depan, serta menelaah dokumen-dokumen perencanaan antara lain Renstra kementrian/lembaga, Renstra Provinsi, RT/RW Kabupaten Musi Banyuasin dan KHLS sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik;
2. Pengembangan Infrastruktur;
3. Pengembangan Ekonomi Lokal;
4. Koplik Agraria;
5. Kesejahteraan Masyarakat;
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dengan mengangkat ke 6 (enam) Isu Strategis di atas, di harapkan agar terbentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029, serta dapat menjadikan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur kewilayahan sehingga tercapai sebuah kualitas peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan Babat Supat setiap tahunnya.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal Perubahan PRKPD dengan hasil analisis kebutuhan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel T.C 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tabel T.C31

NAMA OPD : KECAMATAN BABAT SUPAT

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan (2025)						Catatan Penting				
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7					URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN				4.390.413.685,00	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN				4.390.413.685,00		
	7	01				BIDANG URUSAN KECAMATAN				4.390.413.685,00	BIDANG URUSAN KECAMATA				4.390.413.685,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	3.864.748.985,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	3.864.748.985,00		
							Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	100%					Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	100%			
							Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%			
							Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	100%					Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	100%			
	7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100 %	15.358.974,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100 %	15.358.974,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen	Kab. Musi Banyuasin,	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	7.858.974,00	Penyusunan Dokumen	Kab. Musi Banyuasin,	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	7.858.974,00	Pajak Daerah	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan (2025)					Catatan Penting	
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Perencanaan Perangkat Daerah	Sekayu, Serasan Jaya	Perangkat Daerah			Perencanaan Perangkat Daerah	Sekayu, Serasan Jaya	Perangkat Daerah			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7.500.000,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bayar	28 Orang	2.786.325.596,50	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bayar	28 Orang	2.786.325.596,50	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	2.786.325.596,50	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	2.786.325.596,50	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	46.762.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	46.762.000	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	-	Pajak Daerah
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas	2 Orang	46.762.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas	2 Orang	46.762.000,00	Pajak Daerah

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan (2025)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Tugas dan Fungsi	Jaya	dan Fungsi dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIM			Tugas dan Fungsi	Jaya	dan Fungsi dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIM			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	100%	381.253.471,50	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	100%	381.253.471,50	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.996.927,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.996.927,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	115.406.910,50	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	115.406.910,50	Pajak Daerah
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	19.994.874,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	19.994.874,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	24.471.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	24.471.400,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7.021.860,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7.021.860,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.785.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.785.000,00	Pajak Daerah

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan (2025)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.576.500,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.576.500,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	48.700.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	48.700.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	48.700.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	48.700.000,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	346.126.943,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	346.126.943,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanKabel/Inter net	12 Laporan	155.616.499,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanKabel/Inter net	12 Laporan	155.616.499,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.510.444,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.510.444,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	100%	240.222.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	100%	240.222.000,00	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan (2025)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	78.840.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	78.840.000,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.792.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.792.000,00	Pajak Daerah
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	11.590.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	11.590.000,00	Pajak Daerah
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	501.151.200,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	501.151.200,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	465.577.000,00	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	465.577.000,00	
2	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	465.577.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	465.577.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan (2025)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	02	2.02		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persenatse Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	33.099.200,00	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persenatse Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	33.099.200,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.099.200,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.099.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	2.475.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	2.475.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Dokumen	2.475.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Dokumen	2.475.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
3	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penegakan Perda	100%	6.880.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penegakan Perda	100%	6.880.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan	100%	6.880.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan	100%	6.880.000,00	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan (2025)					Catatan Penting			
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	6.880.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	6.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	100%	3.873.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	100%	3.873.500,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	3.873.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	3.873.500,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 orang	3.873.500,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 orang	3.873.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase jumlah Desa yang dibina	100%	13.760.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase jumlah Desa yang dibina	100%	13.760.000,00	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan (2025)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	13.760.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	13.760.000,00	
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	6.880.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	6.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	6.880.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	6.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
										4.390.413.685,00					4.390.413.685,00	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan/ Aspirasi para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun perangkat Daerah Kabupaten terkait langsung dengan pelayanan dan Infrastruktur di wilayah Kecamatan, dari penelitian lapangan dan pengamat pelaksanaan Musrembang Kecamatan dengan tim teknis Mitra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

USULAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TA PERUBAHAN 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

OPD : KECAMATAN BABAT SUPAT

Tabel T.C32

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	Kepala Desa Supat Barat	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jalan	JALAN PRODUKSI DESA SUPAT BARAT DALAM KONDISI RUSAK PERLU COR BETON	DUSUN 4 DESA SUPAT BARAT KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Diterima untuk diteruskan ke tahap pembahasan	500	M	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	Kepala Desa Letang	Kelurahan / Desa	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tidak adanya Penerangan Jalan Menuju Pemukiman (Perlu Pembangunan Lampu jalan)	Dusun 1, Dusun 6 dan Dusun 7 Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Diterima untuk diteruskan tahap pembahasan	20	Titik	120.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	Kepala Desa Sumber Jaya	Kelurahan / Desa	Pembangunan Bangunan Gedung	TIDAK ADANYA TEMPAT PERTEMUAN YANG MENDUKUNG	RT 4, DUSUN 2 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Usulan Diterima Judul : Pembangunan Balai Desa Sumber Jaya Kec. Babat Supat	1	Unit	400.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
4	Kepala Desa Langkap	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jalan	Jalan Poros Desa dalam Kondisi Berlumpur (Perlu Cor Beton / Aspal Hotmit)	Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Diterima untuk diteruskan ke tahap pembahasan	2	Km	400.000.000	Pembangunan Jalan
5	Kepala Desa Gajah Mati Babat Supat	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jalan	JALAN POROS DESA DALAM KONDISI RUSAK BERAT (PERLU PERKERASAN / COR BETON)	RT 02-RT 03 DUSUN 1 DAN RT 2 DUSUN 4 DESA GAJAH MATI KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Diterima untuk diteruskan ke tahap pembahasan	700	M	600.000.000	Pembangunan Jalan
6	Kepala Desa Seratus lapan	Kelurahan / Desa	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Ruang Belajar TK/PAUD AL AZZAM	Dusun 4 Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	Diteruskan ke OPD Teknis, Sesuaikan dengan Kewenangan dan Prioritas	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD AL AZZAM Dusun 4 Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat	1	Unit	300.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
7	Kepala Desa Tanjung Kerang	Kelurahan / Desa	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kurangnya Penerangan jalan yang memadai	Dusun 1 Sampai Dengan Dusun 10 Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Diterima untuk diteruskan tahap pembahasan	20	Titik	300.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
8	Kepala Desa Babat Banyuasin	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jalan	JALAN POROS DESA DALAM KONDISI RUSAK BERAT (PERLU Pengerasan/cor	DUSUN 3, 4, 7 DAN 9 DESA BABAT BANYUASIN KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap	Diterima untuk diteruskan ke tahap pembahasan	2	Km	400.000.000	Pembangunan Jalan

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				BETON)	BANYUASIN, Kab. Musi Banyuasin	Ruang		oleh Kepala Desa.					
9	Kepala Desa Gajah Muda	Kelurahan / Desa	Pembangunan Bangunan Gedung	TIDAK ADANYA TEMPAT PERTEMUAN YANG MENDUKUNG	DUSUN 1 DESA GAJAH MUDA KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Usulan Diterima Judul : Pembangunan Gedung Pertemuan Desa Gajah Muda Kec. Babat Supat	1	Unit	400.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
10	Kepala Desa Bandar Tenggulang	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi DAM Parit	AIR PARIT SKUNDER TIDAK MENGALIR KARENA DANGKAL DAN TERTUTUP RUMPUT SEHINGGA BANJIR TERHADAP LAHAN WARGA	DUSUN 1-5 DESA BANDAR TENGGULANG, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	Untuk dicermati kelengkapan proposal bantuan	sampaikan proposal dan kelengkapan lainnya	1	paket	300.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
11	Kepala Desa Babat Ramba jaya	Kelurahan / Desa	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	TIDAK ADANYA PENERANGAN JALAN YANG MEMADAI	DUSUN 1 , 2 DAN 3 DESA BABAT RAMBA JAYA, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Diterima untuk diteruskan tahap pembahasan	20	Titik	300.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
12	Kepala Desa Tenggulang Jaya	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Bangunan Gedung	REHAB GEDUNG BALAI DESA DI DESA TENGGULANG JAYA	TENGGULANG JAYA, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Usulan Diterima Judul : Rehab Balai Desa Tenggulang Jaya Kec. Babat Supat	1	Unit	250.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
13	Kepala Desa Babat Banyuasin	Kelurahan / Desa	Penataan Bangunan dan Lingkungan	PENATAAN HALAMAN KANTOR CAMAT DENGAN PAVING BLOCK	DUSUN 3 DESA BABAT BANYUASIN, Kab. Musi Banyuasin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan disetujui	Lengkapi bukti pendukung foto lokasi (3 foto) dan surat proposal yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa.	Usulan Diterima Judul : Penataan Halaman Kantor Camat Babat Supat dengan Paving Block	1	Unit	500.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BABAT SUPAT

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi RPJMN tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 adalah

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 adalah

“Sumsel maju terus untuk semua”

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan, pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
3. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.
4. Meningkatkan penyeenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berbasis dgital, menuju pelayanan public yang berkualitas.Meningkatkan

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten, kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

5. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
6. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai Upaya mengatasi perubahan iklim.

Visi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 adalah

“Muba Maju Lebih Cepat Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin”

Dari Visi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif dan Melayani.
2. Penguatan SDM melalui transformasi bidang Pendidikan dan Kesehatan
3. Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera
4. Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas.
6. Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi
7. Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Dinamika kebijakan pembangunan Nasional antara lain :

1. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

3. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Dukungan Swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing.
 - 1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
 - 1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
2. Menurunkan Angka Kemiskinan
 - 2.1 Menurunkannya ketimpangan pendapatan Masyarakat
 - 2.2 Menurunkannya Tingkat pengangguran terbuka
 - 2.3 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah
 - 3.1 Meningkatnya pendapatan Masyarakat
 - 3.2 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan
 - 3.3 Terjaganya Stabiitas harga bahan pokok
4. Mewujudan Masyarakat Religius, Rukun, dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan.
 - 4.1 Terciptanya kerukunan umat beragama

- 4.2 Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat
- 4.3 Meningkatnya Usaha / industri yang merapkan standar halal
- 5. Mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan Publik yang berkualitas
 - 5.1 Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik
 - 5.2 Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN
 - 5.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 6. Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas
 - 6.1 Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan kabupaten)
 - 6.2 Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman
 - 6.3 Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak
- 7. Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan berdaya saing
 - 7.1 Meningkatnya Inovasi Daerah
 - 7.2 Meningkatnya kewirausahaan dan kemampuan Masyarakat dalam menggunakan teknologi digital
 - 7.3 Meningkatkan Pembangunan Desa
- 8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 - 8.1 Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
 - 8.2 Turunnya Potensi Risiko Bencana

Dengan mengacu hal tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi maka penyesuaian Isu strategis RKPD

Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2025 pada perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Penurunan Kemiskinan, Stunting dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat masih rendah;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah;
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian dan digitalisasi Pelayanan Publik;
5. Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan upaya penegakan hukum;
6. Pelestarian lingkungan dan penurunan risiko bencana;
7. Tuan Rumah PORPROV Sumsel XV dan PEPARPROV Sumsel V Tahun 2025.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah merancang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pondasi Transformasi melalui Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
2. Menyiapkan Pondasi Transformasi melalui Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Kemiskinan serta Membentuk Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah
3. Menyiapkan Pondasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk menciptakan Kerukunan Umat, Ekosistem Usaha Halal dan Pengelolaan Dana Umat
4. Membangun dan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
5. Menyiapkan sinergi/kolaborasi Pemerintah dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan Daya Saing Daerah

6. Menyusun Peta Jalan Pengelolaan SDA berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Penurunan Risiko Bencana, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Rencana Perluasan Jaringan Gas Rumah Tangga

Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin juga memperhatikan 5 (lima) Arah Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang disebut Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, fokus pada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, fokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi dengan pendekatan Omnibus Law;
4. Penyederhanaan Birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang serta menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Perwujudan Transformasi Ekonomi;
2. Peningkatan kondusivitas perekonomian wilayah;
3. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah;
4. Peningkatan kualitas dan daya saing Angkatan kerja;
5. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan dan Kesehatan;
7. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
8. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah;
9. Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sumatera Selatan.

Memperhatikan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2025 serta rancangan isu strategis, maka Perubahan Rancangan Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 diarahkan pada ***“Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju lebih Cepat dan Sejahtera”***.

Untuk mendukung tema Pembangunan tahun 2025 tersebut maka ditetapkan 6 (enam) Prioritas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumatan;
2. Rekonstruksi sosial dan ekonomi melalui peningkatan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan kemiskinan;
3. Meningkatkan percepatan pemerataan infrastruktur dasar untuk konektivitas mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
6. Transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, inovatif dan melayani.

Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur Urusan Kewilayahan guna mendukung ***Misi 1 (satu)*** Kabupaten Musi Banyuasin yaitu ***“Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Inovatif dan Melayani”*** dengan tujuan sasaran Kabupaten RPJMD 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Daerah P-RKPD 2025
1	2	3	3	4	5	6	7
	Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Inovatif dan Melayani	Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatkan ya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Inovatif dan Melayani

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Babat Supat

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Tujuan dan Sasaran serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi Kabupaten Musi Banyuasin, Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, yang akan mengarahkan rumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaannya dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.1

Tujuan Kecamatan Babat Supat

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4
1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dinyatakan pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Berikut ini adalah sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Babat Supat untuk Tahun 2025 dan indikator sasarannya :

Tabel 3.2.2

Sasaran Kecamatan Babat Supat

sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4
1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan	1. Persentase penyelesaian pelayanan yang tepat waktu	%	100
	2. Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang dibina	%	100
2. Terwujudnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan	1. Persentase penyelesaian laporan permasalahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	%	100

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya melakukan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Babat Supat yang dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini :

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Babat Supat

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1	2	3	4
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
2	Persentase penyelesaian pelayanan yang tepat waktu	Persentase penyelesaian pelayanan yang tepat waktu	100%
3	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang dibina	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang dibina	100%
4	Persentase penyelesaian laporan permasalahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	Persentase penyelesaian laporan permasalahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	100%

cara pencapaiannya Indikator diatas melalui tahapan Penetapan kebijakan yang merupakan legal dari sub kegiatan, kegiatan yang akan dilaksanakan serta penyusunan program-program strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan **program, kegiatan dan sub kegiatan** guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran tujuan pemerintah daerah. Kebijakan dilaksanakan melalui strategi :

1. Memperpendek prosedur, mempercepat waktu penyelesaian, meningkatkan kualitas produk pelayanan dan infrastruktur Pelayanan publik;
2. Pengembangan ekonomi desa, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan desa, dan peningkatan akses informasi serta teknologi;
3. Peningkatan peran serta masyarakat, optimalisasi anggaran dan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang perlindungan masyarakat;
4. Pencegahan, mediasi, kolaborasi dan memahami akar masalah, melibatkan berbagai pihak, dan mencari solusi yang berkelanjutan;
5. Pengembangan dan peningkatan kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran Kabupaten yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dilakukan. Perangkat Daerah, **Program** merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan **kegiatan** merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten. Dan **sub kegiatan** Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan

strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

III.3 Program dan Kegiatan

Mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin, maka Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur kewilayahan maka mempunyai beberapa program, Kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung 2 (dua) sasaran strategis adalah :

➤ ***Sasaran Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan***

Di dukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- 2, Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

➤ Sasaran Terwujudnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan

Di dukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas

dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Babat Supat diatas tidak akan berjalan secara maksimal dan sesuai yang diharapkan tanpa adanya sasaran pendukung Perangkat Daerah, Sasaran Pendukung adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Sasaran strategis Perangkat Daerah maka Kecamatan Babat Supat telah menetapkan 1 (satu) Sasaran pendukung yaitu :

➤ ***Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan***

Di dukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut ::

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah..

Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan/Material;
7. Fasilitas Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BABAT SUPAT

Rencana Kerja pada Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin hampir semua dilaksanakan dalam lingkup Kecamatan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan akan terus di tingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor Seperti :

- Sumber daya manusia yang berkualitas;;
- Anggaran yang memadai;
- Sarana dan prasarana yang lengkap;
- Serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat Kecamatan

Setiap Sasaran, program, Kegiatan dan Sub kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahunnya. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Adapun Program, Kegiatan Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3
I	Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3
		Kecamatan 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
II	Terwujudnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan	1 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
III	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2. Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2. Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan/Material 7. Fasilitas Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Mebel 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari tabel diatas dapat dilihat Untuk menunjang program **Utama** dan Program **Pendukung** Perangkat Daerah Kecamatan Babat Supat pada tahun Perubahan 2025 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Sasaran Pendukung Perangkat Daerah yaitu :

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan
Yang terdiri dari 2 Program, 4 Kegiatan dan 5 Subkegiatan
2. Terwujudnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan

Yang terdiri dari 4 Program, 6 Kegiatan dan 7 Subkegiatan

Sasaran Pendukung

1. Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

Yang terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 19 Subkegiatan

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Babat Supat**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kecamatan Babat Supat				3.644.159.642	3.548.719.688	4.390.413.685				3.920.474.800	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.644.159.642	3.548.719.688	4.390.413.685				3.920.474.800	
	7	01				KECAMATAN				3.644.159.642	3.548.719.688	4.390.413.685				3.920.474.800	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.064.231.442	3.064.231.442	2.968.791.488	3.864.748.985				3.270.474.800	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	24.999.948	24.999.948	15.358.974				31.474.800	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	9.999.948	9.999.948	7.858.974	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		15.737.400	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	7 Laporan	7 Laporan	15.000.000	15.000.000	7.500.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		15.737.400	KECAMATAN BABAT SUPAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Kinerja SKPD										
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.056.333.151	1.979.448.753	2.786.325.597				2.024.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.056.333.151	1.979.448.753	2.786.325.597	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		2.024.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	59.739.000	59.739.000	46.762.000				70.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	21 Paket	9.780.000	9.780.000	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		20.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	49.959.000	49.959.000	46.762.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua	Pajak Daerah		50.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Kel/Desa				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	100 %	100 %	354.464.838	354.464.838	381.253.472				500.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	9.996.927	9.996.927	9.996.927	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		15.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	31 Paket	54.356.968	54.356.968	115.406.911	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)		70.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	19.994.874	19.994.874	19.994.874	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		25.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	24.683.349	24.683.349	24.471.400	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		80.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	14.043.720	14.043.720	7.021.860	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		30.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		60.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	40.070.000	40.070.000	55.785.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		60.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	151.319.000	151.319.000	108.576.500	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		160.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	25.330.261	25.330.261	48.700.000				100.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25.330.261	25.330.261	48.700.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)		100.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	303.142.244	284.586.688	346.126.943				380.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	111.626.244	111.626.244	155.616.499	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)		80.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	191.516.000	172.960.444	190.510.444	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		300.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	240.222.000	240.222.000	240.222.000				165.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	78.840.000	78.840.000	78.840.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		80.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	149.792.000	149.792.000	149.792.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat	Pajak Daerah		85.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Dipelihara/Direhabilitasi						Supat, Semua Kel/Desa				
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	11.590.000	11.590.000	11.590.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		0,00	KECAMATAN BABAT SUPAT
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)	100 %	100 %	530.901.200	530.901.200	501.151.200				570.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	492.852.000	492.852.000	465.577.000				500.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	492.852.000	492.852.000	465.577.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		500.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	33.099.200	33.099.200	33.099.200				70.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	12 Laporan	33.099.200	33.099.200	33.099.200	Kab. Musi Banyuasin,	Dana Bagi Hasil (DBH)		70.000.000	KECAMATAN BABAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Babat Supat, Semua Kel/Desa				SUPAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	4.950.000	4.950.000	2.475.000			-		KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	4.950.000	4.950.000	2.475.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	KECAMATAN BABAT SUPAT
3	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Babat Supat	100 %	100 %	13.760.000	13.760.000	6.880.000				30.000.000	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda	100 %	100 %	13.760.000	13.760.000	6.880.000				30.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	13.760.000	13.760.000	6.880.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		30.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)	100 %	100 %	7.747.000	7.747.000	3.873.500				20.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik diwilayah Kecamatan	100 %	100 %	7.747.000	7.747.000	3.873.500				20.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	30 Orang	7.747.000	7.747.000	3.873.500	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		20.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat	100 65 % %	100 65 % %	27.520.000	27.520.000	13.760.000				30.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang dibina	65 %	65 %	27.520.000	27.520.000	13.760.000				30.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa											
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	13.760.000	13.760.000	6.880.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		15.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	14 Laporan	13.760.000	13.760.000	6.880.000	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		15.000.000	KECAMATAN BABAT SUPAT
	J U M L A H									3.644.159.642	3.548.719.688	4.390.413.685				3.920.474.800	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Babat Supat tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Babat Supat tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 serta Visi-Misi dan Program unggulan Kepala Daerah Terpilih serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan. Rencana kerja dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. untuk mendukung tujuan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin ***“Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas”*** dengan Sasaran ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”*** tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Kecamatan babat Supat. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Untuk Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin merencanakan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran Strategis dengan 8 (delapan) kebijakan didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan, 3 (tiga) Indikator Sasaran, 8 (delapan) Indikator Program dengan 5

(lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan.

Dalam Pencapaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian dan kerjasama antar seksi di jajaran Kecamatan sebagai unsur perencanaan sekaligus pelaksanaan dari Sub kegiatan, Kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan Tahun Anggaran Perubahan 2025.

**CAMAT BABAT SUPAT,
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
DEBBY HERYANTO. S.STP.,M.Si
Pembina Tk.1/ IV.b
NIP 19830709 200212 1 001